



# Kejaksanaan Geledah Kantor Pemkot

## Usut Dugaan Korupsi Bansos

PONTIANAK - Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan pengeledahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kantor Wali Kota Pontianak terkait dugaan korupsi bansos tahun anggaran 2006 sampai 2008.

Pengeledahan dilakukan pada pukul 08.30 wib. Dengan menggunakan empat buah mobil minibus, tim penyidik mendatangi kantor Walikota Pontianak. Tampak dari dekat, Assisten Pidana Khusus Kejati Kalbar, Didik Istiyanta membawa sebuah berkas yang disimpan di dalam map menuju ruang Wali Kota

### DOKUMEN YANG DISITA

Dokumen	Jumlah
1. Dok. Bansos 2006	10 dus
2. Dok. Bansos 2007	6 dus
3. Dok. Bansos 2008	5 dus
4. Dok. Persipon	8 dus
5. Dok. LPTQ	1 dus
6. Dok. campuran	1 dus
7. Daftar Pengisian Anggaran (DPA)	6 dus
8. APBD tahun anggaran 2006, 2007, 2008 termasuk di dalamnya DPA sekretariat daerah tahun 2006, DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2007, 2008	
9. Surat perintah membayar (SPM) Bansos 2006	
10. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Bansos 2007 dan 2008	

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

GRATIS.BUDIDHEKIV/PONTIANAKPOST





## Kejaksanaan Geledah Kantor Pemkot

*Sambungan dari halaman 1*

Pontianak, Sutarmidji. Tak lama setelah itu, pria yang mengenakan rompi bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi ini keluar dari ruangan orang nomor satu di Kota Pontianak tersebut. Dengan dipandu ajudan Wali Kota Pontianak, rombongan penyidik menuju ruang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kantor Wali Kota Pontianak.

Rombongan yang diperkirakan berjumlah delapan orang itu langsung menuju ruang arsip. Ada beberapa orang penyidik yang membawa koper. Namun setelah hampir kurang satu jam, penyidik Kejati Kalbar dibantu PNS Pemkot Pontianak keluar dengan puluhan kardus yang berisi arsip dan dokumen terkait bansos. Setidaknya ada 37 dus yang diboyong kejaksanaan.

Assisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Didik Istiyanta mengatakan, pengeledahan ruang BPKAD ini bertujuan untuk melengkapi berkas pemeriksaan adanya dugaan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) tahun anggaran 2006 sampai 2008 yang disinyalir merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. "Hari ini kami lakukan pengeledahan di ruang BPKAD. Pengeledahan ini untuk melengkapi berkas atau barang bukti adanya proposal fiktif dalam penggunaan

bansos tahun itu," kata Didik ditemui sejumlah wartawan usai pengeledahan di ruang BPKAD, kemarin.

Dikatakan Didik, berkas atau arsip tersebut nanti akan dilakukan pemilahan untuk menentukan berapa jumlah profosal yang masuk. "Nanti akan kami pilah-pilah dulu. Karena berdasarkan data jumlah dana pada tahun pada 2006 sebesar Rp42 M, 2007 sebesar Rp37 M, dan 2008 sekitar Rp31 M. Ini tidak semua terindikasi korupsi, namun akan kami lakukan pemeriksaan kembali," lanjutnya.

Sejauh ini, kata Didik, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang disinyalir mengetahui aliran dana bansos tersebut. Bendahara pengeluaran dan kasubag keuangan kala itu. "Inisialnya D dan E," lanjutnya.

Dijelaskan Didik, pihaknya juga akan membandingkan hasil audit dan pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kalbar tahun 2006 sampai tahun 2008. "Kalau perlu, kami akan bandingkan dengan hasil LHP BPK itu," jelasnya.

Sementara itu berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar menemukan indikasi kerugian daerah Rp21,46 miliar pada pengelolaan bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota Pontianak tahun ang-

garan (TA) 2006-2008. Selain temuan yang berindikasi kerugian daerah, BPK RI juga menemukan permasalahan lain yaitu pertanggungjawaban penggunaan dana bansos Rp3 M untuk pembangunan sirkuit balap motor pada pengurus cabang Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Pontianak yang tidak jelas. Permasalahan lainnya yakni penatausahaan dana bansos oleh KONI Kota Pontianak kurang memadai dan dana sebesar Rp8.446.285.000 belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

BPK RI menjelaskan indikasi kerugian daerah yang ditemukan BPK meliputi penggunaan dana bansos Rp. 16.058.153.000 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Diantaranya menimbulkan indikasi kerugian daerah Rp12.477.903.000. Dari besaran tersebut meliputi realisasi dana bansos tahun 2006 Rp4.821.000.000 digunakan untuk kepentingan Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Selanjutnya, realisasi dana bansos Rp2.181.653.000 yaitu TA 2006 Rp261.525.000, TA 2007 sebesar Rp540.900.000 dan TA 2008 sebesar Rp1.379.228.000 digunakan untuk kepentingan Walikota Pontianak. Juga ditemukan dana bansos sebesar Rp1.830.000.000 yaitu TA 2007 sebesar Rp500.000.000 dan TA 2008 sebesar Rp1.330.000.000 digunakan untuk kepentingan

DPRD Kota Pontianak.

Ditemukan pula dana bantuan sebesar Rp400.250.000 digunakan untuk keperluan Walikota Pontianak (2007-2008), sebesar Rp100.000.000.

Temuan lainnya yakni realisasi dana bansos senilai Rp2.685.500.000 disalurkan melalui anggota DPRD Kota Pontianak diantaranya sebesar Rp785.000.000 tidak sampai kepada penerima dana.

Terakhir, realisasi dana bantuan sosial disalurkan oleh Sekretaris Daerah sebesar Rp2.360.000.000 tidak ada bukti pertanggungjawabannya. BPK juga menemukan indikasi kerugian keuangan daerah dari realisasi dana bantuan sosial tahun 2007 sebesar Rp1.730.000.000 dan dana APBD lainnya sebesar Rp3.200.053.975 yang digunakan untuk menutup pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (ketekoran kas). Indikasi kerugian daerah yang ditemukan BPK RI juga termasuk pada pemberian dana bansos TA 2006, 2007 dan 2008 sebesar Rp2.183.944.000,00 yang tidak sampai kepada penerima bantuan. Ditemukan pula realisasi belanja bansos sebesar Rp935.000.000 yang didasarkan pada proposal permohonan dana bantuan fiktif. Temuan lainnya yakni Pajak Penghasilan (PPH) atas kontrak pemain Persipon minimal sebesar Rp939.750.000 tidak dipungut dan disetor ke kas Negara. (arf)